



**DISKAN  
KOTA DUMAI**




**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# **DINAS PERIKANAN** *Tahun 2026* **RENCANA KERJA (RENJA)**



 [diskan.dumaikota.go.id](http://diskan.dumaikota.go.id)

 0765-4300498

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif tahun 2026.
- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai tahun 2026;
  - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 36 SERI 0

## KATA PENGANTAR

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kota Dumai pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dumai, 10 Oktober 2025

  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KOTA DUMAI,  
**H. AFRILAGAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024</b> .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	42
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	43
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	45
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ..	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b>	
1. SK Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026	

## DAFTAR TABEL

1.	Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 .....	11
2.	Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2024.....	11
3.	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja pada Tahun 2024 Kota Dumai .....	12
4.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Penghambat .....	17
5.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan .....	17
6.	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan .....	21
7.	T.C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai ...	25
8.	Perumusan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai .....	29
9.	Faktor Penghambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	32
10.	Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
11.	T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2026 .....	36
12.	T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau Kota Dumai .....	42
13.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 .....	45
14.	T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Dumai .....	48
15.	Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 .....	59
16.	Rumusan Rencanan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 .....	63

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan renja merupakan salah satu dokumen penting dalam Laporan Kinerja (LK) yang perlu disusun dan sebagai jembatan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja (LK).

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Dinas Perikanan Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2026, melalui tahapan-tahapan: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.

Renja Dinas Perikanan Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2026 serta berdasar pada RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 dan RPJPD

Kota Dumai Tahun 2025-2045. Selain itu, dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, renja Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, karena:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun selanjutnya.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut,

Walikota Dumai telah menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022.

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk melaksanakan tugas Dinas Perikanan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha,
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembudidaya Ikan, yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kenelayanan, yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, tahapan penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal

3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan Dokumen RKPD dan renja perangkat daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan renja perangkat daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Dumai.

Sebagai amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai perangkat daerah pada tahun 2026 ini menyusun rancangan awal rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menyusun rancangan awal rencana kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 33 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Dumai Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 32 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri D).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud disusunnya dokumen rancangan awal renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2026. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen rancangan awal renja Dinas Perikanan Kota Dumai, antara lain:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026 pada periode tahun 2026.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Dumai berupa latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang reuiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan pada tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahn Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Dumai
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD RI

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampau;
2. Implikasi terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Evaluasi renja Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2024 menilai pelaksanaan renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 yang dibandingkan dengan perubahan renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026 dan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kota Dumai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas

Perikanan Kota Dumai selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

**a. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**b. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun anggaran 2024 dilakukan pada 4 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 dibiayai oleh APBD Kota Dumai sebesar **Rp. 7.822.760.100 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah)**. Realisasi dari kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 82,91% atau sebesar **Rp 6.485.999.102 (enam milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah)**. Adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Dinas Perikanan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja Pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.036.865.442</b>	<b>6.156.198.530</b>	<b>87,48</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.833.851.300	2.693.035.304	95,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.418.176.092	2.678.427.676	78,36
5.1.05	Belanja Hibah	784.838.050	784.735.550	99,99
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>785.894.658</b>	<b>329.800.572</b>	<b>41,96</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.889.778	325.404.972	50,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.004.880	4.395.600	3,03
<b>Total</b>		<b>7.822.760.100</b>	<b>6.485.999.102</b>	<b>82,91</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

Catatan: Realisasi anggaran sampai dengan 17 Desember 2024

Anggaran sebesar Rp. 6.485.999.102,- digunakan untuk memenuhi pelaksanaan 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran anggaran yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2 dan evaluasi hasil pelaksanaan renja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.726.792.762	4.031.897.277	85,25%
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	182.400.000	155.650.000	85,33%
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.774.961.530	2.228.710.025	80,31%
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	138.594.000	69.741.800	50,32%
<b>Total</b>		<b>7.822.760.100</b>	<b>6.485.999.102</b>	<b>82,91</b>

Tabel 3. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	0%	Ranwal, Rankhir dan Renja Perubahan
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	LKJIP, LKPJ, LPPD dan Laporan SPPD
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	100%	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	100%	Penambahan CPNS
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	RKBMD Murri dan Perubahan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83.33%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	0 Orang	6 Orang	5 Orang	83.33%	7 Orang	7 Orang	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan pegawai
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Disesuaikan dengan jadwal dan undangan
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%	Kebutuhan Dinas
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	8 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	0%	Kebutuhan Operasional
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	82 Unit	82 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	Penggantian mebeleur yang rusak
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%	Penggantian mebeleur yang rusak
3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Gaji TKPK
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%	Pembayaran pajak, pemeliharaan, dan BBM
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%	Rehab Gedung kantor
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>									
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	21 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%	Pelatihan nelayan
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompok	20 Kelompok	22 kelompok	25 Kelompok	136.36%	24 Kelompok	24 Kelompok	100%	Pembinaan dan Pendampingan Nelayan
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	81 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0%	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%	Bantuan pendanaan
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	10 Unit	100%	HIBAH Nelayan
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan bina kelompok budidaya</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>										
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	10 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	100%	8 Kelompok	8 Kelompok	100%	HIBAH Budidaya
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	100%	25 Kelompok	25 Kelompok	100%	Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	16 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	Bantuan pendanaan
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	0 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	100%	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	Pelatihan
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>										
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	Operasional UPT BIAT
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Uji Kualitas Air dan Kegiatan Penurunan angka beresiko stunting
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	250 Orang	250 Orang	100%	Pembinaan dan Pendampingan kelompok nelayan
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Operasional UPT Air Payau
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
3.25.06.2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan</b>										
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Data AKI dan POKLAHSAR
3.25.06.2.02	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>										
3.25.06.2.02.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	0.25 ton	0.1 ton	0.1 ton	100%	0.1 ton	0.1 ton	100%	GEMARIKAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi pada Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
1.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan anggaran daerah yang belum stabil</li> </ul>	Target jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu perencanaan yang matang dan memiliki time table Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</li> </ul>

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung laporan capaian kinerja</li> <li>• Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar, realisasi kinerja SKPD yang disusun sesuai dengan</li> </ul>	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat tersusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
		peraturan perundang-undangan mencapai 100% sesuai dengan target		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan perkiraan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan	Kegiatan diselesaikan sesuai	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
		perundang-undangan serta mencaatat yang sudah tersedia dalam arsip	dengan target	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>• lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b> Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi bantuan hibah kepada kelompok pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan</li> <li>Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu</li> </ul>	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran</li> <li>Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sharing ilmu dan teknologi dengan kerjamasa pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran</li> <li>Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pendampingan kepada POKDAKAN binaan secara kontinu</li> <li>Sharing ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembudidayaan ikan</li> </ul>	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
3.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	Melakukan pendataan/survey lapangan secara	Kegiatan diselesaikan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan pelaksanaan</li> </ul>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
	Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	kontinu untuk mendapatkan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	dengan target	kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sosialisasi GEMARIKAN, promosi produk perikanan.</li> <li>• Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan</li> </ul>	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran</li> <li>• Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>

Sesuai dengan perincian pada Tabel 5 di atas, adapun faktor yang mempengaruhi capaian program/kegiatan sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana kerja 2024 maupun renstra adalah sebagai berikut:

- a) Komitmen pemimpin di Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
  - b) SDM di Dinas Perikanan cukup mendukung dalam pencapaian target tersebut.
3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
1	<b>PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didukung oleh ASN dan tenaga pendamping yang terampil</li> <li>• Tumbuh dan berkembangnya kelompok baru</li> <li>• Didukung oleh peningkatan produksi perikanan tangkap</li> <li>• Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu</li> <li>• Penilaian klasifikasi kelas KUB</li> </ul>	Capaian pada tahun berkenaan melebihi dari target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran</li> <li>• Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan</li> </ul>

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan Kota Dumai harus memperhatikan indikator output sub kegiatan yang telah tertuang di dalam dokumen renja perangkat daerah, sehingga terjadi keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaporan.
- b. Secara keseluruhan, sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah terealisasi sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

Sebagaimana telah dijabarkan pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 di atas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 yang perlu diambil sehingga program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal tetap harus dijaga, mengingat seringnya terjadi mutasi/pergeseran jabatan.

- b. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- c. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.
- d. Menyusun aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- e. Optimalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan. Hal ini didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- f. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan usaha perikanan.
- g. Peningkatan sosialisasi Gemarikan dan menjaring kemitraan untuk mendukung pendanaan dan implementasi Gemarikan secara luas.
- h. Koordinasi secara intensif dengan praktisi dan akademisi dalam rangka menjaring teknologi baru untuk dapat diterapkan kepada pelaku usaha perikanan.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan bidang teknis perikanan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima dan cepat. Hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada perubahan renstra perangkat daerah tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan
3. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024, Dinas Perikanan Kota Dumai telah melaksanakan program/kegiatan yang memprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk apabila tidak segera dilakukan penanganan. Adapun penjabaran dari kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. T-C.30 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya		Produksi Perikanan Tangkap	1.118 ton	1.280 ton	1.290 ton	1.300 ton	1.280,27 ton	1.280 ton	1.290 ton	1.300 ton	Capaian melebihi target yang ditetapkan
			Produksi Perikanan Budidaya	330 ton	340,15 ton	350,36 ton	360,87 ton	292,44 ton	340,15 ton	350,36 ton	360,87 ton	Capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	22 kelompok	24 kelompok	26 kelompok	26 kelompok	25 kelompok	25 kelompok	26 kelompok	26 kelompok	Capaian melebihi target
			Cakupan Bina Kelompok Budidaya	37 kelompok	40 kelompok	43 kelompok	44 kelompok	44 kelompok	44 kelompok	43 kelompok	44 kelompok	Capaian melebihi target
			Angka Konsumsi Ikan	50,6 kg/kap/thn	46,68 kg/kap/thn	47 kg/kap/thn	47,5 kg/kap/thn	46,60 kg/kap/thn	46,68 kg/kap/thn	47 kg/kap/thn	47,5 kg/kap/thn	Capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan

Sesuai dengan pencapaian IKU pelayanan urusan bidang perikanan tahun 2024 yang dijabarkan pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditetapkan, ada 5 (lima) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan, yaitu (1) produksi perikanan tangkap, (2) produksi perikanan budidaya, (3) cakupan bina kelompok nelayan, (4) cakupan bina kelompok budidaya, dan (5) angka konsumsi ikan. Berikut penjelasan dari masing-masing IKU

1. **Produksi Perikanan Tangkap**, merupakan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dari perairan umum, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Target dari indikator ini adalah sebesar 100% atau sebanyak 1.118 ton. Pada tahun 2024, capaian indikator ini adalah sebesar 114,51% atau sebesar 1.280,27 ton. Pencapaian ini dimungkinkan karena peran aktif pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dengan kebijakan pendistribusian BBM bersubsidi langsung ke sentra nelayan, program bantuan pemerintah, penyuluhan dan pendampingan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta lama melaut dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.
2. **Produksi Perikanan Budidaya**, merupakan pengumpulan dari semua hasil pembudidayaan ikan yang dipelihara, dibesarkan, dan/atau dibiakkan serta dipanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol. Target dari indikator ini adalah sebesar 100% atau sebanyak 330 ton. Pada tahun 2024, capaian dari indikator ini adalah sebesar 88,62% atau sebanyak 292,44 ton. Penurunan angka produksi perikanan budidaya dikarenakan oleh pertumbuhan ikan yang melambat karena faktor kualitas air, benih yang digunakan dan pakan; tingginya tingkat kematian ikan saat pemeliharaan; adanya serangan penyakit, fluktuasi harga pakan, serta banyak pembudidaya yang beralih profesi.
3. **Cakupan bina kelompok nelayan**. Target dari indikator ini adalah sebesar 84,62% atau sebanyak 22 kelompok. Pada tahun 2024, cakupan bina kelompok nelayan adalah sebanyak 25 kelompok atau sebesar

113,64% melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Capaian ini disebabkan oleh peran aktif penyuluh teknis di lapangan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok nelayan, bantuan yang diberikan dari pemerintah, serta tumbuhnya kelompok baru.

4. **Cakupan bina kelompok budidaya.** Target dari indikator ini adalah sebesar 85% atau sebanyak 37 kelompok. Pada tahun 2024, cakupan bina kelompok budidaya sebanyak 44 kelompok atau sebesar 118,92% melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Capaian ini disebabkan oleh peran aktif penyuluh teknis di lapangan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok nelayan, serta bantuan yang diberikan dari pemerintah.
5. **Angka Konsumsi Ikan.** Target dari indikator ini adalah sebesar 50,6 kg/kapita/tahun. Capaian yang didapat adalah sebesar 46,60 kg/kapita/tahun atau sebesar 91,69% dari target yang ditetapkan. Hasil yang didapat belum mencapai target dikarenakan (1) budaya masyarakat yang belum familiar dengan ikan karena masih memilih daging ayam dan sapi sebagai protein hewani, (2) kurangnya pemahaman tentang manfaat gizi ikan, (3) percaya dengan mitos negatif, seperti makan ikan akan menyebabkan cacangan, dan (4) daya beli masyarakat yang rendah terhadap ikan yang berkualitas.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, terdapat permasalahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai. Hal ini dikarenakan oleh terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka akan mengurangi wewenang Kabupaten/Kota dalam mengelola laut 0-4 mill dari garis Pantai. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Dumai tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan sumber daya laut dan lainnya. Akibatnya banyak nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

2. Terbatasnya akses pemodalán bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepercayaan pihak bank terhadap pelaku usaha perikanan dalam mengajukan pinjaman terkait pengembangan usaha.
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Kota Dumai dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap. Selain itu, banyak nelayan Kota Dumai yang masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem laut, serta menyatunya jalur pelayaran dengan wilayah penangkapan di Kota Dumai.
4. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya. Ada banyak hal yang menjadi faktor belum berkembangnya pengelolaan perikanan budidaya, salah satunya adalah harga pakan yang masih berfluktuasi. Sampai saat ini Dinas Perikanan Kota Dumai masih berupaya dalam menindaklanjuti hal tersebut dengan pengadaan pakan ikan secara mandiri. Namun hasil yang didapatkan belum memenuhi standar yang ditetapkan.
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 8. Perumusan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai

Tipe/Isu Peringkat Daerah	Permasalahan/ Tingkat Kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan dan Kelautan yang menjadi kewenangan daerah	Belum optimalnya pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai	Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Terbatasnya kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai	Memprioritaskan kegiatan yang mendukung pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap pelaku usaha perikanan
	Terbatasnya akses pemodal/investor bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan	Adanya prosedur dari pihak perbankan yang sulit dipenuhi oleh nelayan, pembudidaya maupun pengolah/pemasar produk perikanan	Sulit berkembangnya usaha perikanan atau cenderung stagnan, baik itu untuk pembangunan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan	Optimalisasi pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha
	Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam pengembangan usaha</li> <li>• Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur</li> <li>• Penggunaan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan</li> <li>• Menyatunya jalur pelayaran dengan area penangkapan</li> <li>• Perkembangan teknologi perikanan tangkap</li> <li>• Terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-3408 Tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi perikanan tangkap tidak memenuhi target yang ditetapkan</li> <li>• Tidak memenuhi kebutuhan ikan di Kota Dumai</li> <li>• Rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh nelayan</li> </ul>	<p>Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</li> <li>b. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap</li> <li>c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap</li> <li>d. Fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil</li> <li>e. Pembinaan, pendampingan dan</li> </ol>

Tupoksi Peringkat Daerah	Permasalahan/ Tingkat Kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam pengembangan usaha</li> <li>• Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur</li> <li>• Penggunaan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan</li> <li>• Fluktuasi harga pakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi perikanan tangkap tidak memenuhi target yang ditetapkan</li> <li>• Tidak memenuhi kebutuhan ikan di Kota Dumai</li> <li>• Rendahnya pendapatan yang diperoleh pembudidaya ikan</li> </ul>	<p>pelatihan bagi nelayan kecil</p> <p>Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan</li> <li>b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan</li> <li>c. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan</li> <li>d. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya</li> <li>e. Pengembangan kapasitas bagi pembudidaya ikan</li> </ol>
	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran hasil perikanan yang belum sistematis</li> <li>• Produk yang dihasilkan belum menjadi produk unggulan</li> <li>• Angka konsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan</li> <li>• Menurunnya minat Masyarakat terhadap produk pengolahan hasil perikanan</li> </ul>	<p>Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan</li> <li>b. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk</li> <li>c. Memperbaiki jaringan pemasaran untuk</li> </ol>

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ Tingkat Kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
				<p>produk olahan hasil perikanan</p> <p>d. Penguatan minat konsumsi ikan dikalangan masyarakat terutama pada anak sekolah</p>

Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan Kota Dumai mendukung dalam pencapaian misi ketiga yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Produktif. Misi ketiga bertujuan untuk menciptakan perekonomian Kota Dumai yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Perikanan merupakan salah satu pon penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk mewujudkan perekonomian yang produktif di Kota Dumai. Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai 3 (tiga) program unggulan, yaitu program Pengelolaan Perikanan Tangkap, program Pengelolaan Perikanan Budidaya, serta program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, terdapat beberap hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Faktor Penghambat	Keterangan
1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SDM.</b> Pada sektor perikanan masih memiliki pola pikir tradisional, tidak memiliki akses terhadap teknologi yang memadai, dan belum memiliki keterampilan yang belum merata</li> <li>• <b>Infrastruktur.</b> (1) Tidak mempunyai fasilitas TPI. Hal ini dikarenakan TPI telah menjadi wewenang DKP Provinsi Riau; (2) Belum semua pembudidaya menerapkan CPIB atau CPIB dalam berbudidaya; (3) Mahalnya harga pakan.</li> </ul>
2	Logistik dan Geografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, jalur penangkapan ikan di Kota Dumai menyatu dengan jalur pelayaran.</li> <li>• Terdapat beberapa wilayah di Kota Dumai yang tidak bisa diakses dengan jalur darat pada musim penghujan. Hal ini dikarenakan belum adanya perbaikan jalur transportasi darat di daerah tersebut.</li> </ul>
3	Tantangan Iklim dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim yang tidak menentu dapat berakibat pada kualitas air dan daya dukung lingkungan perikanan budidaya</li> <li>• Pencemaran lingkungan baik dari limbah domestik maupun industri dapat menurunkan kualitas air dan menyebabkan kematian pada ikan.</li> </ul>
4	Ekonomi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemodalan dan Akses Pasar.</b> Pelaku usaha perikanan terutama yang berskala kecil dan tradisional, seringkali terkendala dalam</li> </ul>

No	Faktor Penghambat	Keterangan
		<p>mendapatkan akses modal maupun jaringan pasar. Sehingga mempersulit dalam mengembangkan usahanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harga Pakan dan Bahan Baku.</b> Pakan merupakan salah satu modal terbesar dalam usaha budidaya ikan. Dipasaran harga pakan dan bahan baku pakan sangat tinggi.</li> <li>• <b>Penangkapan Ilan Ilegal.</b> Merupakan ancaman terbesar bagi nelayan. Karena praktik penangkapan ikan ilegal merupakan ancaman besar terhadap kelestarian sumber daya ikan.</li> </ul>
5	Data dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan data perikanan yang akurat masih lemah. Walaupun sekarang sudah ada perbaikan dalam pendataan data perikanan dalam Satu Data KKP</li> <li>• Penerapan kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir masih menjadi permasalahan dalam pengembangan perikanan.</li> </ul>
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Dumai untuk mengkonsumsi Ikan. Namun saat ini Dinas Perikanan sudah mengoptimalkan kampanye Gerakan Makan Ikan bagi anak usia sekolah, calon pengantin, dan ibu rumah tangga.</li> </ul>

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD 2026

Dokumen perencanaan kerja Dinas Perikanan Kota Dumai berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029, rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029, dan memperhatikan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2026. Penjabaraan prioritas pembangunan daerah terhadap sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam program pembangunannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10. Penjabaraan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program	Kinerja Tahun 2026	
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.290 ton
2.	Meningkatnya produksi	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	350,36 ton

No	Sasaran	Program	Kinerja Tahun 2026	
	perikanan budidaya			
3.	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	47 kg/kap/thn

Review terhadap rancangan akhir RKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026. Berdasarkan Ranwal Renja 2026, Dinas Perikanan Kota Dumai mendapatkan pagu sebesar **Rp. 4.949.037.191,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)**. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) program teknis dan 1 (satu) program penunjang urusan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Secara umum, pagu anggaran tersebut belum memenuhi kebutuhan rutin maupun kebutuhan teknis dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Dumai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Perikanan mengajukan penambahan anggaran sebanyak **Rp. 2.943.615.699,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**. Adapun penambahan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan:

1. Penambahan anggaran gaji untuk PNS, CPNS, PPPK Tahap I dan Tahap II.
2. Penambahan anggaran untuk gaji TKPK, serta pembayaran listrik dan air.
3. Program prioritas Walikota Dumai terkait bantuan bioflok dan hibah.
4. Kegiatan penurunan angka keluarga beresiko stunting, kampanye Gemarikan, dan Lomba Masak Serba Ikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Selain itu, pada analisis kebutuhan rankhir yang dijabarkan pada Tabel 11, dapat dilihat ada beberapa sub kegiatan yang tidak diakomodir dalam renja akhir 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Hal ini dilakukan karena ketersediaan kendaraan operasional Dinas Perikanan sudah memenuhi.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Hal ini terjadi karena dari hasil verifikasi sistem di SIPD, tidak ada nelayan atau kelompok nelayan yang mengajukan permohonan hibah kepada Dinas Perikanan.

Tabel 11. T-C 31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3					4.949.037.191	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.892.652.890	
3	25				4.949.037.191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.892.652.890	
3	25	01			3.956.409.274	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	5.428.489.414	
3	25	01	2.01		73.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Dokumen	73.500.000	
3	25	01	2.01	0001	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.500.000	Kebutuhan 12 Bulan dan penyelesaian dokumen perencanaan PD
3	25	01	2.01	0006	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	70.000.000	Kebutuhan 12 bulan dan penyelesaian dokumen capaian kinerja
3	25	01	2.02	0001	2.585.752.760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	2.585.752.760	Penyesuaian Anggaran Gaji dan TPP PNS, PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II
3	25	01	2.02	0001	2.585.752.760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	3.819.903.000	
3	25	01	2.03		50.784.431	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik	2 Dokumen	50.784.431	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50.784.431	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50.784.431	Kebutuhan utk perencanaan BMD
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	35.000.000	kebutuhan untuk bimtek PNS
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.250.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	180.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	180.000.000	pemenuhan kebutuhan rutin 12 bulan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD			
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Unit	141.872.083	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Unit	127.554.100	
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	30.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	81.372.083	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	97.554.100	Penggantian mebel yang rusak di Diskan
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	30.000.000	Penggantian AC yg rusak
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	572.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	942.997.883	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	memenuhi kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	179.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	205.550.000	memenuhi kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.853.403	memenuhi kebutuhan rutin 12 bulan
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	380.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	725.094.480	Gaji TKPK 12 bulan
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	13 Unit	125.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	13 Unit	95.500.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							<b>Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemerintahan Daerah</b>			
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	95.500.000	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN</b>	100%	14.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN</b>	100%	31.464.295	
3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang Tumbuh, Berkembang dan Meningkatkan Kelasnya</b>	26 Kelompok	14.000.000	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang Tumbuh, Berkembang dan Meningkatkan Kelasnya</b>	26 Kelompok	31.464.295	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	26 Kelompok	9.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	26 Kelompok	31.464.295	Pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan
3	25	03	2.02	0004	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	10 Unit	5.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	0 Unit	-	Hibah Kenelayanan Tidak Dilaksanakan karena tidak ada yang mengirim proposal
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA</b>	100%	882.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA</b>	100%	2.205.160.663	
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>Jumlah Kelompok Budidaya yang Tumbuh, Berkembang, dan Meningkatkan Kelasnya</b>	40 Kelompok	100.000.000	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>Jumlah Kelompok Budidaya yang Tumbuh, Berkembang, dan Meningkatkan Kelasnya</b>	40 Kelompok	1.211.111.048	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	1.150.087.048	Prioritas Walikota (kolam bioflok), angka hibah belum masuk

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	61.024.000	Pelatihan untuk pembudidaya
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	440.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	484.486.000	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT Benih Ikan Air Tawar
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	103.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	117.079.000	Program Kesling dan Kegiatan Penurunan angka keluarga beresiko stunting
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	9.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	22.083.215	Pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	230.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	370.401.400	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT Budidaya Air Payau
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI</b>	100%	96.627.917	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI</b>	100%	227.538.518	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi		Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	1 Dokumen	3.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi		Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	1 Dokumen	14.309.718	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (RANKHIR)					Catatan	
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
					<b>Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>		Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				<b>Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>		Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dumai	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dumai	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	14.309.718	Penyediaan data pengolah dan pemasar serta data AKI	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.1 Ton	93.627.917	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.1 Ton	213.228.800	GEMARIKAN, HARKANNAS	
3	25	06	2.03	0001	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	93.627.917	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	213.228.800		

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 dilakukan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan tahun 2026.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
1.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok sebesar Rp 1.135.940.500,00	

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatkan Tangkapan Ikan Berkelanjutan, Mengembangkan Ekonomi Lokal, dan Menciptakan Lapangan Kerja"** yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Untuk menjalankan visinya, misi yang mendukung visi KKP adalah (1) meningkatkan investasi kelautan dan perikanan; (2) meningkatkan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program; (3) meningkatkan nilai kinerja logistik hasil perikanan; (4) meningkatkan volume produk olahan kelautan dan perikanan, (5) meningkatkan konsumsi ikan, dan (6) meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan. Beberapa prioritas utama KKP untuk tahun 2025-2029, antara lain (1) meningkatkan tangkapan ikan berkelanjutan melalui sistem berbasis kuota; (2) mengembangkan ekonomi lokal; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemrosesan, terutama di daerah tertinggal.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029, terdiri atas:

1. Ekonomi Biru. Kebijakan ini sejalan dengan 8 (delapan) misi astacita yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045;
2. Peningkatan tangkapan ikan berkelanjutan. Kebijakan ini dilakukan melalui sistem berbasis kuota.
3. Pengembangan ekonomi lokal dan lapangan kerja. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemrosesan, terutama di daerah tertinggal.

4. Pengawasan internal. Kebijakan ini akan bergeser dari paradigma lama yang mengedepankan aspek ketaatan dan kepatuhan, menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan fungsi sebagai pengawal program strategis.
5. Audit 5.0. Kebijakan ini akan memanfaatkan big data analytics untuk mempertajam pengawasan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, yaitu dengan cara sebagai berikut:
  - a. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
  - b. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
  - d. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil
  - e. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil
2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, yaitu dengan cara sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan
  - b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
  - c. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
  - d. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya
  - e. Pengembangan kapasitas bagi pembudidaya ikan
3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
  - a. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan
  - b. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk
  - c. Memperbaiki jaringan pemasaran untuk produk olahan hasil perikanan
  - d. Penguatan minat konsumsi ikan di kalangan Masyarakat terutama pada anak sekolah

4. Peningkatan jumlah SDM yang berkompeten sesuai dengan jumlah beban kerja.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
6. Pertumbuhan dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat usia muda

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Dumai tahun 2026 adalah ***“Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industry yang unggul dan bertumpu pada pemajuan budaya melayu (Dumai Kota Idaman)”*** dengan fokus pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2026. Tema RKPD Kota Dumai tahun 2026 adalah ***Penguatan Industri dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2026, isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, serta tujuan dan sasaran renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan nelayan dan		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2026
	pembudidaya perikanan		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102
2		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.290 ton
3		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	350,36 ton
4		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	47 kg/kap/thn

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Aktivitas instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi perangkat daerah dengan dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Rencana kegiatan diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Program dan kegiatan merupakan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Sejalan dengan visi Kota Dumai yaitu: ***"Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"***, maka penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2026 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Walikota Dumai ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini.

Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 12.

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa ada 4 (empat) program, 13 kegiatan dari 29 sub kegiatan yang menjadi rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2026. Pada tahun ini, terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan pada program pengelolaan perikanan tangkap yaitu, penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil. Sub kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberian bantuan berupa sarana prasarana kepada nelayan kecil sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota.

Untuk kegiatan penurunan angka keluarga beresiko stunting, Dinas Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2026. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada keluarga beresiko stunting tentang cara memilih ikan yang layak konsumsi. Kegiatan tersebut terdapat dalam sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 14. T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kota Dumai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>DINAS PERIKANAN</b>				<b>7.892.652.890,00</b>				<b>11.435.000.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>7.892.652.890,00</b>				<b>11.435.000.000,00</b>
	<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>7.892.652.890,00</b>				<b>11.435.000.000,00</b>
<b>1</b>	<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>100%</b>	<b>5.428.489.414,00</b>		<b>100%</b>	<b>8.625.000.000,00</b>
		[ Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan ]	Persentase Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	-		<b>100</b>	<b>5.428.489.414,00</b>	-	<b>100</b>	<b>8.625.000.000,00</b>
	<b>3.25.01.2.01</b>	Perencanaan, Fanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, panggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			<b>7 dokumen</b>	<b>73.500.000,00</b>		<b>7 Dokumen</b>	<b>105.000.000,00</b>
	<b>3.25.01.2.01.0001</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	5.000.000,00
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	100.000.000,00
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	3.819.905.000,00			1 Dokumen	6.000.000.000,00
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang/bulan	3.819.905.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Orang/bulan	6.000.000.000,00
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		2 Dokumen	50.784.431,00			-	100.000.000,00
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mhik Daerah SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.784.431,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	35.000.000,00			-	150.000.000,00
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		7 Dokumen	283.250.000,00			-	655.000.000,00
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	61.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		29 Unit	127.554.100,00				260.000.000,00
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	97.554.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		4 Laporan	942.997.883,00				1.205.000.000,00
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	205.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.853.403,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	725.094.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Perikanan		900.000.000,00
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		13 Unit	95.500.000,00				150.000.000,00
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dmas atau Kendaraan Dmas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	15 Unit	95.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
2	3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	-		-	31.464.295,00			-	100.000.000,00
		[ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ]	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	-	1290	31.464.295,00	-	-	-	100.000.000,00
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</i>		26 kelompok	31.464.295,00			-	100.000.000,00
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil								
			<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	26 Kelompok	31.464.295,00	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000,00
3	3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	-		-	2.205.160.663,00			-	2.360.000.000,00
		[ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ]	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	-	350.36	2.205.160.663,00	-	-	-	2.360.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</i>		40 Kelompok	1.211.111.048,00				460.000.000,00
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapastias</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kelompok	1.150.087.048,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Kelompok	400.000.000,00
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	61.024.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Kelompok	60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Pendidikan dan Pelatihan</i>							
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang Terlaksana</i>		4 Kegiatan	994.049.615,00			4 Kegiatan	1.900.000.000,00
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	484.496.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	800.000.000,00
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	117.079.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	200.000.000,00
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat								
			<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Unit	22.083.215,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		250 Unit	100.000.000,00
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat								
			<i>Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan</i>	Kota Dumai, Semua	1 Dokumen	370.401.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	800.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
4	3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI</b>		100%	227.538.518,00			100%	350.000.000,00
		[ Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai ]	Angka Konsumsi Ikan	-	47	227.538.518,00	-	-	47,5	350.000.000,00
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>		1 Dokumen	14.369.718,00			1 Dokumen	50.000.000,00
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.369.718,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000,00
	3.25.06.2.03	Penyediaan dari Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		1 Dokumen	213.228.800,00			1 Dokumen	300.000.000,00
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.1 Ton	213.228.800,00	DANA BAGI HASIL (DEH)		0.2 Ton	300.000.000,00
<b>J U M L A H</b>						<b>7.892.652.890,00</b>			<b>11.435.000.000,00</b>	

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan regulasi yang telah diberlakukan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pemetaan program tersebut, maka dilakukan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Berikut hasil pemetaan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.

Tabel 15. Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>
<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina</b>
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase wilayah sampel aki</b>
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu indikatif yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar **Rp. 4.949.037.191,-** (*empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pagu yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp 7.892.652.890,-** (*tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*). Adapun perincian program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut.

Tabel 16. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS PERIKANAN</b>						7.892.652.890,00							11.435.000.000,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.892.652.890,00							11.435.000.000,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.892.652.890,00							11.435.000.000,00	
1,	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENJAJE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-			100%	5.428.489.414,00						100%	8.625.000.000,00	
		[ Terleaksananya Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan ]	Persentase Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	5.428.489.414,00	-	-	-	-	-	100	8.625.000.000,00	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			7 dokumen	73.500.000,00					Dinas Perikanan	7 Dokumen	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASULI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan	3 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASULI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	3.819.903.000,00					Dinas Perikanan	1 Dokumen	6.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	325.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.819.903.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMLM (DAU)			Dinas Perikanan	36 Orang/bulan	6.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	50.784.431,00					Dinas Perikanan	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	50.784.431,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	35.000.000,00					Dinas Perikanan	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	283.250.000,00					Dinas Perikanan	-	655.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	61.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJACPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJACPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUL G. JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa							
	325.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		50.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		20.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		20.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		5.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		300.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29 Unit	127.554.100,00					Dinas Perkeran		260.000.000,00	DINAS PERIKAWAN
	325.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	97.554.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan	HENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perkeran		200.000.000,00	DINAS PERIKAWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENSIR TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENSIR TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									. Semua Kel/Desa							
	325.01.207.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			4 Laporan	942.997.883,00					Dinas Perikanan	-	1.205.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.208.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.208.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	205.550.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.208.000 3	Penyediaan Jasa Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.853.403,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.208.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	725.094.480,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			13 Unit	95.500.000,00					Dinas Perikanan	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.01.209.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jekatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUL G. JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Rakyatnya				13 Unit	95.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPKTA NASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2,	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	31.464.295,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1300	1280/27	1280	1280	31.464.295,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	-			26 kelompok	31.464.295,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sebada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Nelayan	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya				26 Kelompok	31.464.295,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sebada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Nelayan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	325.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	2.205.160.663,00	-	-	-	-	-	-	2.360.000.000,00	-
		[ Meningkatkan produksi perikanan budidaya ]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	394,34	2924,4	3901,5	380,36	2.205.160.663,00	-	-	-	-	-	-	2.360.000.000,00	-
	325.04.2.02	Pemberdayaan Perbudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok perbudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan mehingkat kelompoknya	-	-	-	40 kelompok	1.211.111.048,00	-	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung kemardinaan bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Perbudidaya Ikan	-	460.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.02.000 1	Pengembangan Kapasitas Perbudidaya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Perbudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 kelompok	1.150.087.048,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung kemardinaan bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Perbudidaya Ikan	8 kelompok	400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.02.000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu				3 kelompok	61.024.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Perbudidaya Ikan	25 kelompok	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUL G. JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								kemandirian bangsa melalui swa-sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	325.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang Terlaksana	-			4 Kegiatan	994.049.615,00			Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa-sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Perbudidaya Ikan	4 Kegiatan	1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.04.000 2	Penyelesaian Pasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	481.486.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa-sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Perbudidaya Ikan	1 Unit	800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.04.000 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengalokasian Kesehatan Ikan				1 Dokumen	117.079.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DEH)	Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.04.001.0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				250 Unit	22.083.215,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DEH)	Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan	250 Unit	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.04.2.04.001.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Usulan Dukung Pemantauan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	3.040.140,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DEH)	Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUL G. JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kreait, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENYAAN WILAYAH SAMPELAKI	-			100%	227.538.518,00						100%	350.000.000,00	
		[Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai]	Angka Konsumsi Ikan	49	466	468	47	227.538.518,00	-	-	-	-	-	47,5	350.000.000,00	-
	3.25.06.201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-			1 Dokumen	14.309.718,00			Memantap kan sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung kemandiraa n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreaitif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.201.000 5	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	14.309.718,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DEH)	Memantap kan sistem pertahanan keamanan negara dan mendukung kemandiraa n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreaitif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIR ACPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	325.062.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Dokumen	213.228.800,00			Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dari ancaman teroris, narkoba, radikalisme, terorisme, dan kejahatan transnasional	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	325.062.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				01 Ton	213.228.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DEH)	Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	02 Ton	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
<b>JUMLAH</b>								7.892.652.890,00							11.435.000.000,00	

## BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

3. Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Dumai
4. Kegiatan yang menjadi prioritas kepala daerah terpilih sesuai dengan bidang urusan Perikanan
5. Kegiatan yang belum terakomodir pada Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026 disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen pihak terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian gambaran tentang Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2026 yang akan datang. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kota Dumai dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang.

  
PEMERINTAH KABUPATEN DUMAI  
DINAS PERIKANAN  
**H. AFRIDAGAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



# PEMERINTAH KOTA DUMAI

## DINAS PERIKANAN

Jalan Dermaga No. 08 Purnama Telp. (0765) 4300498  
Email : [diskandumai@gmail.com](mailto:diskandumai@gmail.com)/[diskan@dumaikota.go.id](mailto:diskan@dumaikota.go.id) - Dumai 28823

### KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 53 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026

#### WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
  12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Sei E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Sei E)
  13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri D)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026;
  2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun;
  4. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja;
  5. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja yang selaras dengan Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026
- KETIGA : Keputusan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada tanggal : 6 Januari 2025



**H. AFFLIAGAN, S.H., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19720412 200112 1 003

Lampiran Keputusan Walikota Dumai  
Nomor : 53 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	H. AFRILAGAN, S.H., M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	ISROYANTI, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	SRI GUSTIANA CANDRA, S.Pi, M.Sc	Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan	Anggota
4	SURYA, S.Pi	Kepala Bidang Kenelayanan	Anggota
5	SOETJIE POERNAMA SARI, S.IK, MM	JF. Perencana Ahli Muda	Anggota
6	MIFTA URISKA WULAN DARI	TKPK Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota
7	MELIANA AGUSTIN	TKPK Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 6 Januari 2025



KEPALA DINAS PERIKANAN  
DUMAI,

**H. AFRILAGAN, S.H., M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19720412 200112 1 003